IMPLEMENTASI PROGRAM GENERASI BERENCANA (GENRE) DALAM MENYIAPKAN KEHIDUPAN BERKELUARGA BAGI REMAJA

AYU RATNASARI

ABSTRAK

Program Generasi Berencana merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah upaya merespon berbagai permasalahan terkait remaja yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup remaja dengan memberikan informasi dan pengetahuan terkait dengan penyiapan diri remaja menghadapi masa depan dan menyongsong kehidupan berkeluarga dengan baik yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis implementasi Program Generasi Berencana dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi Program Generasi Berencana dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep belum berhasil diimplementasikan secara maksimal dimana hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya angka pernikahan dini di Kabupaten Sumenep. Komunikasi pada aspek sosialisasi berhasil dilakukan dengan baik namun pada aspek intensitas komunikasi belum dilakukan dengan maksimal. Sumber daya yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM) implementor Program Generasi Berencana jumlahnya tidak proporsional dengan cakupan luas wilayah sasaran program, sedangkan fasilitas serta sumber daya finansial sudah cukup mendukung proses implementasi dari Program Generasi Berencana. Disposisi yang dimiliki pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep cukup baik serta operasional prosedur yang digunakan oleh para implementor sangat mudah dipahami.

Kata Kunci: Implementasi, Program Generasi Berencana

A. PEDAHULUAN

Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak ke masa dewasa. Kehidupan remaja merupakan kehidupan yang sangat menentukan bagi kehidupan masa depan mereka selanjutnya (BKKBN, 2012: 01). Berdasarkan data proyeksi penduduk pada tahun 2014, jumlah remaja Indonesia mencapai sekitar 65 juta jiwa atau 25% dari 255 juta jiwa penduduk yang ada di Indonesia (Zilmawati, dkk, 2016: 4739). Usia remaja dapat dikatakan sebagai usia produktif dimana para remaja nantinya dapat memiliki kontribusi lebih terhadap pembangunan suatu negara mengingat bahwa remaja adalah generasi penerus bangsa dan *agent of change* sehingga memiliki peran yang sangat penting dalam membantu proses ketercapaian tujuan suatu bangsa.

Dalam perkembangannya, jumlah remaja yang besar diikuti juga dengan kualitas permasalahan remaja yang beragam seiring dengan masa transisi yang dialami oleh remaja. Masa transisi kehidupan remaja oleh Bank Dunia dibagi menjadi 5 hal (*Youth Five Life Transition*), transisi kehidupan yang dimaksud menurut *Progress Report World Bank* adalah melanjutkan sekolah (*continue learnin*g), mencari pekerjaan (*start working*), memulai kehidupan berkeluarga (*form*

families), menjadi anggota masyarakat (*exercise citizenship*), dan mempraktikkan hidup sehat (*practice healthy life*) (BKKBN, 2013: 02).

Adapun permasalahan yang sering terjadi terkait remaja tergolong dalam tiga resiko yang dihadapi remaja yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi remaja (TRIAD KRR) yaitu seksualitas, NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif), HIV (*Human Immuno Deficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*). Tahun 2014, remaja yang melakukan pernikahan usia 15-19 tahun presentasenya mencapai 46% dan remaja yang menikah dibawah usia 15 tahun presentasenya sekitar 5% (http://m.tribunnews.com diakses tanggal 21 Maret 2017).

Jawa Timur menempati urutan kedua sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak setelah Jawa Barat yaitu mencapai 36.717.483 jiwa dari enam provinsi yang ada di Pulau Jawa. Permasalahan teror kependudukan di Jawa Timur juga tidak terlepas dari remaja. Fertilitas yang merupakan penyumbang angka tertinggi pada LPP menjadi salah satu masalah yang saat ini dihadapi oleh Jawa Timur. Tingginya angka pernikahan dini di Jawa Timur membuat angka ASFR (*Age Specific Fertility Rate*) yang merupakan angka banyaknya kelahiran per 1000 wanita pada kelompok usia tertentu tergolong tinggi terutama pada kelompok tertentu pada usia remaja, di Jawa Timur, angka ASFR (*Age Specific Fertility Rate*) sudah melampaui rata-rata nasional (Adib, 2015: 88). Data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur menunjukkan kasus pernikahan dini di Jawa Timur jumlahya mencapai lebih dari 3000 pasangan pada tahun 2015 (http://www.antarajatim.com diakses tanggal 02 Desember 2016).

Permasalahan terkait remaja di Kabupaten Sumenep juga tidak terlepas dari seksualitas, NAPZA, HIV dan AIDS. Pada tahun 2016, Kabupaten Sumenep menduduki peringkat ke 3 sebagai daerah yang memiliki angka pernikahan dini tertinggi di Jawa Timur. Faktor tingginya pernikahan dini di sebabkan karena budaya masyarakat dan masalah ekonomi serta keterbatasan informasi mengenai bagaimana seharusnya para remaja mempersiapkan diri sebelum menikah baik dari segi fisik maupun non fisik. Informasi terkait dampak negatif dari pernikahan dini juga menjadi salah satu penyebab mengapa budaya pernikahan dini masih kental di Kabupaten Sumenep (http://sorotpublik.com di akses tanggal 15 Desember 2016).

Data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep menyatakan bahwa pada tahun 2015 data terkait pernikahan berdasarkan umur istri menunjukkan sebanyak 390 perempuan di Kabupaten Sumenep melakukan pernikahan dibawah umur 21 tahun dan 202 perempuan menikah di umur 21-25 tahun.

Sebagai upaya utuk merespon berbagai permasalahan terkait remaja, maka pemerintah melakukan berbagai program dan kegiatan yang disebar ke instansi terkait sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam perundang-undangan. Dalam rangka mengemban amanat undang-undang dan merespon permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh remaja sebagaimana yang telah dijelaskan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Nasional (BKKBN) mengembangkan Program Generasi Berencana (GenRe) bagi remaja dan keluarga yang memiliki remaja dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga pasal 48 ayat 1 (b) yang mengatakan bahwa "Peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga". Program Generasi Berencana berkaitan dengan bidang kehidupan yang kelima dari transisi kehidupan remaja yaitu mempraktikkan pola hidup sehat (*practice healthy life*).

Dalam Program Generasi Berencana, selain remaja diharapkan terbebas dari tiga resiko kesehatan reproduksi remaja juga diharapkan mampu menunda usia pernikahan pertama hingga mencapai usia 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Dengan adanya Program Generasi Berencana, remaja juga diharapkan mampu merencanakan masa depan dengan baik termasuk bagaimana cara membentuk sebuah keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Keluarga adalah lingkup utama dan terpenting dalam proses pembentukan karakter remaja. Melalui pola asuh yang baik maka berimplikasi terhadap pembentukan karakter yang baik bagi diri remaja dimana pola asuh tersebut dapat berupa kedekatan orang tua dengan remaja, pengawasan orang tua dan komunikasi orang tua dengan remaja. Melalui komunikasi yang baik, sebuah keluarga hendaknya dapat menjadi sumber informasi dan pendidik utama tentang kesehatan reproduksi remaja juga tentang bagaimana seorang remaja merencanakan hidupnya dengan baik seiring masa transisi yang akan dilewati oleh remaja sehingga penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja juga menjadi salah satu hal terpenting bagi remaja untuk diketahui.

Sejak awal tahun 2013 promosi Program Generasi Berencana digalakkan melalui advokasi program yang diarahkan untuk terbentuknya wadah Bina Keluarga Remaja dan wadah Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau Mahasiswa. Menurut data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep, pada tahun 2015 terdapat 28 kelompok Bina Keluarga Remaja dan 48 kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau Mahasiswa yang telah terbentuk. Pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau Mahasiswa tercapai di hampir semua tingkatan wilayah mulai dari wilayah kecamatan hingga wilayah desa baik jalur pendidikan (basis SLTP, basis SLTA dan basis PT) maupun jalur kemasyarakatan (basis agama, pemuda dan lainnya).

B. TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Grindle dalam Akib (2010:02) mendefinisikan implementasi sebagai proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat tertentu dan proses dari implementasi tersebut dapat dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.

Tachjan (2006:25) menjelaskan mengenai implementasi kebijakan publik yakni merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan atau disetujui.

Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika yang *top-down*, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro."

Dapat diketahui bahwasannya implementasi kebijakan memberikan pemahaman tentang bagaimana implikasi dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan yang termuat dalam program-program bagi kehidupan masyarakat, apakah kebijakan tersebut dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada masyarakat atau sebaliknya.

Wahab (2011:159) berpendapat bahwa fungsi implementasi kebijakan publik ialah dapat menerjemahkan kebijakan-kebijakan publik yang pada umumnya masih abstrak kedalam program-program yang lebih operasional (program aksi) yang kesemuanya dilakukan untuk mewujudkan tujuan-tujuan ataupun sarana-sarana tertentu yang diarahkan menuju ketercapaian tujuan dan sasaran yang dikendaki.

Adapun faktor keberhasilan implementasi menurut Edwards III dalam Indiahono (2009: 31) menyatakan terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari sebuah implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan strutur birokrasi.

Program Generasi Berencana (GenRe)

Generasi Berencana merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh BKKBN sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup remaja dengan memberikan informasi dan pengetahuan terkait dengan penyiapan diri remaja menghadapi masa depan dan menyongsong kehidupan berkeluarga dengan baik karena keluarga adalah lingkup utama yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter para generasi penerus bangsa.

Wirdhana (2013: 26), Generasi Berencana (GenRe) adalah suatu program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan dan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Salah satu yang menjadi fokus utama adalah promosi pendewasaan usia perkawinan dengan tujuan meningkatnya median usia kawin pertama khususnya bagi perempuan."

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2013: 18), implementasi nyata dari Program Generasi Berencana ialah melalui terbentuknya Pusat Informasi Remaja atau Mahasiswa dan Bina Keluarga Remaja. Sasaran dalam Program Generasi Berencana antara lain :

a. Remaja usia 10-24 tahun dan belum menikah.
b. Mahasiswa/mahasiswi yang belum menikah.
c. Keluarga yang memiliki remaja maupun tidak memiliki remaja.
d. Masyarakat yang peduli remaja.

Program Generasi Berencana merupakan salah satu program yang diimplementasikan untuk merespon permasalahan yang terjadi dikalangan remaja yang diarahkan untuk mencapai tegar remaja dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja yang diwujudkan dengan terbentuknya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera (BKKBN, 2013: 16).

Strategi pelaksanaan dan pengembangan program GenRe mengacu pada strategi tegar remaja yang bertumpu pada tiga pengembangan faktor-faktor pendukung (*Promotive Factors*) yaitu pengembangan faktor *Assets/Capabilities*, *Resourcess/Opportunities*, dan *Second Chance*. Faktor pendukung yang pertama yaitu pengembangan *Assets/Capabilities* dimaksudkan bahwa program GenRe dikembangkan dengan segala sesuatu yang positif yang terdapat pada diri remaja meliputi, minat, bakat, pengetahuan, hobbi, sikap dan perilaku. Faktor yang kedua yaitu *Resourcess/Opportunities* menitik beratkan pada dukungan dan jaringan yang harus diberikan kepada remaja dan program GenRe oleh semua *stake kholder* antara lain, orang tua, guru/dosen, LSM, organisasi keagamaan dan kepemudaan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintah. Sedangkan faktor yang ketiga ialah *Second Chance* dimana dalam faktor ini pelaksanaan dan pengembangan program GenRe dilakukan dengan memberikan pelayanan kepada remaja yang sudah menjadi korban risiko *free sex*, NAPZA, HIV dan AIDS maupun pernikahan dini agar bisa pulih dan kembali hidup normal.

implementasi nyata dari Program Generasi Berencana ialah melalui terbentuknya Pusat Informasi Remaja atau Mahasiswa dan Bina Keluarga Remaja, definisi terkait dua aspek tersebut yaitu sebagai berikut :

a. Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau Mahasiswa (PIK-R/M), merupakan suatu wadah yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja atau mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja serta kegitan penunjang lainnya (BKKBN, 2012: 07).
b. Bina Keluarga Remaja (BKR), merupakan suatu wadah yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang anak dan remaja secara seimbang melalui komunikasi efektif antara orang tua dan anak remaja (Wirdhana, Indra, dkk, 2013: 02-03).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini yaitu menggunakan model implementasi kebijakan publik dengan pendekatan *top-down.* Berdasarkan model pendekatan *top-down*, dalam fokus penelitian ini mengambil teori dari Edwards III terkait keberhasilan implementasi kebijakan yang dipengaruhi pada 4 faktor, yaitu :

1. Komunikasi, meliputi sosialisasi dan intensitas komunikasi dalam implementasi Program Generasi Berencana di Kabupaten Sumenep.
2. Sumber Daya Manusia (SDM), meliputi fasilitas dan sumber daya finansial dalam mendukung proses implementasi Program Generasi Berencana.

3. Disposisi, yaitu tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana Program Generasi Berencana yang meliputi komitmen, kejujuran dan sikap demokratis.
4. Struktur birokrasi yang meliputi prosedur operasional yang digunakan dalam mengimplementasikan Program Generasi Berencana di Kaupaten Sumenep.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui penelitain yang telah dilakukan terkait Program Generasi Berencana yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencara Kabupaten Sumenep maka didapatkan hasil sebagai berikut :

a. Komunikasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencara Kabupaten Sumenep telah melakukan komunikasi pada elemen-elemen masyarakat di wilayah yang menjadi sasaran Program Generasi Berencana. Sosialisasi dilakukan baik kepada remaja itu sendiri maupun kepada lingkungan keluarga yang outputnya adalah pembentukan kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa bagi remaja dan Bina Keluarga Remaja bagi orag tua remaja atau lingkungan keluarga remaja.

Meskipun sosialisasi Program Generasi Berencana yang dilakukan tidak seluruhnya dilakukan di Kabupaten Sumenep, namun bertambahnya kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa dan Bina Keluarga Remaja di Kabupaten Sumenep merupakan indikator bahwa sosialisasi yang dilakukan bertahap dalam menjangkau wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak pernah dilakukan sosialisasi Program Generasi Berencana.

Dalam pembentukan kelompok-kelompok Generasi Berencana yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep pada tahap awal dilakukan komunikasi dengan tokoh formal maupun non formal di wilayah yang akan dijadikan kelompok sasaran, jika komunikasi tersebut berjalan dengan baik maka dapat dilanjutkan dengan pemberian sosialisasi terhadap masyarakat mengenai apa itu Generasi Berencana lalu akan dibentuk kelompok-kelompok Generasi Berencana, sebagaimana 10 langkah kerja petugas lapangan KB.

Menurut Indiahono (2009: 31) komunikasi merupakan salah satu variabel yang dapat mempengaruhi proses ketercapaian tujuan dari suatu kebijakan karena dengan adanya komunikasi yang efektif maka berimplikasi terhadap kesepahaman antara implementor kebijakan dengan sasaran kebijakan terkait bagaimana arah dan tujuan dari suatu kebijakan yang ditetapkan tersebut.

Sebagaimana teori Indiahono tentang pentingnya komunikasi yang efektif, tentu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep telah melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat karena tidak adanya penolakan Generasi Berencana dari masyarakat yang ditandai dengan bertambahnya kelompok Generasi Berencan di Kabupaten Sumenep.

b. Sumber Daya

Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep menunjukkan bahwa kurangnya jumlah pegawai yang menjadi implementor menjadi salah satu kendala mengapa Program Generasi Berencana tidak dapat terlaksana dengan baik.

Keterbatasan SDM implementor Program Generasi Berencana membuat kelompok-kelompok dari Program Generasi Berencana yang sudah terbentuk cenderung pasif. Kurangnya kontrol dari pembina kelompok yang dalam hal ini adalah petugas lapangan (PLKB) membuat kelompok tersebut tidak dapat berkembang dan aktif dalam kegiatan-kegiatan kelompok yang semestinya dilakukan sesuai dengan oprasional prosedur yang tertera pada buku pedoman.

Kelompok Generasi Berencana yang pasif juga berimplikasi terhadap minimnya pengetahuan tentang materi-materi Program Generasi Berencana seperti pendewasaan perkawinan dan delapan fungsi keluarga dimana materi tersebut berkaitan dengan bagaimana seorang remaja menata kehidupan masa depan dan juga menata kehidupan berkeluarga baginya.

c. Disposisi

Keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan publik salah satunya ialah dilihat dari disposisi atau sifat dari pelaksana kebijakan tersebut. Disposisi yang diharapkan ada pada implementor program dari suatu kebijakan publik ialah kejujuran, komitmen dan demokratis dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan. Sebagaimana teori Edward III dalam indiahono (2009:31) mengatakan kejujuran mengarahkan implementor tetap berada pada arah program yang telah ditetapkan, komitmen mengarahkan implementor tetap berada pada arah dan tujuan yang sejalan dengan kebijakan publik, sedangkan sikap demokratis dapat menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor atau pelaksana kebijakan.

Disposisi yang dimiliki oleh para pegawai yang menjadi implementor program GenRe di Kabupaten Sumenep cukup baik dimana mereka tetap melaksanakan Program Generasi Berencana sesuai dengan kemampuan yang ada sehingga secara kuantitas kelompok GenRe (PIK-R/M dan BKR) mengalami peningkatan dan sosialisasi yang dilakukan semakin meluas.

d. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, ditemukan bahwasannya rentang kendali yang tercipta cukup jauh dari Kepala Dinas dengan Bidang yang bertanggung jawab terhadap implementasi Program Generasi Berencana di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep, hal ini dibuktikan dengan kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kepada pegawai tingkat bawah (UPT Kecamatan) dimana seluruh kegiatan Program Generasi Berencana diserahkan secara utuh pada Bidang KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga untuk mengelola dan memproses seluruh bentuk pelaporan dari UPT Kecamatan. Jauhnya rentang kendali antara pucuk pimpinan dan bawahan dalam

struktur organisasi akan berimplikasi terhadap lambatnya respon perkembangan program (Indiahono, 2009:34).

Pembangunan koordinasi yang baik dari Kepala Dinas dengan bawahannya tentu sangat penting mengingat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana baru terbentuk pada akhir tahun 2016 di Kabupaten Sumenep. Koordinasi yang baik tentu diharapkan mampu memecahkan berbagai solusi yang selama ini ada pada proses implementasi Program Generasi Berencana dan menjadi penghambat dari implementasi tersebut. Pada struktur organisasi pelaksana, diharapkan agar struktur didesain secara ringkas dan fleksibel upaya terhindar dari struktur yang kaku, terlalu hirarkhis dan birokratis serta dapat menjamin adanya pengambilan keputusan yang cepat dan tepat atas kejadian yang terjadi dalam proses pelaksanaan program dari suatu kebijakan (Indiahono, 2009: 31).

Kepala Dinas yang merupakan pimpinan dalam struktur birokrasi hendaknya ikut andil dalam berbagai proses implementasi Program Generasi Berencana karena Kepala Dinas memiliki wewenang tertinggi yang diharapkan mampu mengambil keputusan yang terbaik demi ketercapaian Program Generasi Berencana seperti halnya terkait disposisi yang harus dimliki oleh pegawai dan bagaimana implikasinya. Oleh karena itu, koordinasi yang baik sangat diperlukan upaya terhindar dari struktur birokrasi yang kaku.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang implementasi Program Generasi Berencana dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja di Kabupaten Sumenep sebagaimana fokus dari penelitian ini maka kesimpulan yang penulis peroleh adalah implementasi Program Generasi Berencana yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep belum berhasil diimplementasikan secara maksimal dimana hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya angka pernikahan dini di Kabupaten Sumenep.

a. Komunikasi, intensitas komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep kurang dilakukan sehingga berimplikasi terhadap pasifnya Kelompok Generasi Berencana yang sudah terbentuk di Kabupaten Sumenep.
b. Sumber Daya meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), fasilitas serta sumber daya finansial. Ketersediaan dana yang dianggarkan setiap tahun dan fasilitas berupa sarana alat transportasi bagi pegawai, media elektronik, brosur, pamflet dan buku pedoman cukup membantu kelancaran proses implementasi Program Generasi Berencana di Kabupaten Sumenep. Sedangkan jumlah SDM implementor Program Generasi Berencana di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep tidak proporsional dengan cakupan luas

wilayah sasaran dari Program Generasi Berencana.

c. Disposisi yang dimiliki oleh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep cukup demokratis yang dapat dilihat dari sikap tidak membedakan Kelompok Generasi Berencana yang satu dengan yang lainnya, memiliki komitmen yang tinggi untuk tetap dapat mengimplementasikan Program Generasi Berencana sesuai dengan kemampuan yang ada serta jujur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab khususnya pengelolaan dana dimana ada transparansi pengelolaan dana dalam mengimplementasikan Program Generasi Berencana di Kabupaten Sumenep antara implementor dengan kelompok sasaran.

d. Struktur birokrasi yang mengacu terhadap oprasional prosedur yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep dalam mengimplementasikan Program Generasi Berencana sangat mudah dipahami oleh pegawai yang menjadi implementor dari Program Generasi Berencana di Kabupaten Sumenep.

Adapun saran yang dapat peneliti kemukakan sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan implementasi Program Generasi Berencana dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja di Kabupaten Sumenep sebagai berikut:

a. Komunikasi seharusnya sering dilakukan untuk mengetahui perkembangan kelompok tersebut dan meminimalisir adanya kelompok-kelompok yang tidak aktif yang berimplikasi terhadap minimnya pengetahuan kelompok tentang upaya menata masa depan dengan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan membangun sebuah keluarga dengan baik.

b. Jumlah Sumber Daya Manusia seharusnya melakukan kerjasama dengan pihak lain seperti kelompok masyarakat, lembaga formal atau nonformal upaya mengatasi kurangnya jumlah SDM implementor Program Generasi Berencana di Kabupaten Sumenep serta pengembangan Kelompok Generasi Berencana untuk menjadi Kelompok Tegar agar dapat menjadi sistem kontrol bagi kompok lainnya.

c. Disposisi yang harus ditingkatkan oleh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep adalah kedisiplinan pegawai karena kedisiplinan akan mengacu terhadap pencapaian tujuan yang efisien dan efektif.

d. Pada struktur birokrasi dalam proses koordinasi antara pucuk pimpinan dan bawahan seharusnya di desain tidak terlalu kaku dan hirarkhis sehingga rentang kendali tidak jauh antara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep dengan para petugas lapangan yang menjadi implementor Program Generasi Berencana. Rentang kendali yang tidak jauh berimplikasi pada upaya mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi di lapangan dapat segera teratasi dengan baik.

Daftar Pustaka

Akib, Haedar. 2010. "Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa dan Bagaimana". Dalam *Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 1, Tahun 2010*. hal. 1-11.

Aneta, Asna. 2010. "Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo". Dalam *Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 1, Tahun 2010.* hal. 55-65.

"Angka Pernikahan Dini Sumenep Duduki Peringkat Tigas Jawa Timur", dalam situs http://sorotpublik.com/berita-terkini/angka-pernikahan-dini-sumenep-duduki-peringkat-tiga-jawa-timur.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta.

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan.* Jakarta: Rineka Cipta.

BKKBN. 2013. *Generasi Berencana (GenRe)*. Surabaya: Perwakilan BKKBN Jawa Timur.

BKKBN. 2012. *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa.* Jakarta: BKKBN.

"BKKBN Prihatin Tingginya Angka Pernikahan Dini di Jatim", *Antaranews,* 02 Desember 2016.

BNN. 2016. *Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba pada Kelompok Rumah Tangga di 20 Provinsi Tahun 2015.* Jakarta Timur: Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN RI.

Erana Gherby. 2015. "Kredibilitas Kader Pusat Informasi Dan Konseling (PIK) Dalam Menginformasikan Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja Di Kelurahan Dadi Mulya Kota Samarinda". Dalam *eJournal Ilmu Komunikasi Vol. 4 NO. 2, Tahun 2015.* hal. 224-238.

Hidayat, Rachmad, Adam Idris, dkk. 2014. "Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disisplin PNS Pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Berau". Dalam *eJurnal Administrative Reform Vol. 2 No. 2, Tahun 2014.* hal. 1238-1250.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Machmudin, Mellysa. 2014. "Upaya Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Dalam Mengembangkan Program Generasi Berencana (Genre) Di Kabupaten Berau". Dalam *e-Jurnal Ilmu*

Administrasi Negara Vol. 3 No. 2, Tahun 2014. hal. 814-825.

"Menyelamatkan Bangsa Lewat Generasi Berencana (GenRe)", dalam situs http://www.google.co.id/amp/www.kompasiana.com/amp/astridamayanti/menyelamatkan-bangsa-lewat-generasi-berencana-genre.

Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

"Pentingnya Program GenRe", dalam situs http://bpmpkb.sumenepkab.go.id/artikel.php?id=4

"Pernikahan Dini di Indonesia tergolong Tinggi", *Tribunnews*, 21 Maret 2017.

Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.* Jakarta: Sekretariat Negara.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2015. *Metodologi Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Suandi, I Wayan. 2010 "Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah". Dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 1 No. 1, Tahun 2010.* Diunduh pada tanggal 07 April 2016 di http://ojs.unud.ac.id/index.php/widya/article/download/3682/2710.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik.* Bandung: AIPI.

Utami, Devi Bwi Yana. 2015. "Penyuluhan Program BKKBN Mengenai Generasi Berencana (GenRe) dan Sikap Remaja". Dalam *Jurnal Simbolika Vol. 1 No. 2, Tahun 2015.* hal. 199-210.

Wahab, Solichin Abdul. 2011. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UPT Penerbitan Unversitas Muhammadiyah Malang.

Wirdhana, Indra, dkk. 2013. *Kurikulum Diklat Teknis Bina Keluarga Remaja bagi Kader Bina Keluarga Remaja.* Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Wirdhana, Indra, dkk. 2013. *Kurikulum Diklat Teknis Bina Pengelolaan PIK Remaja/Mahasiswa.* Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Zilmawati, Efik. 2016. "Pelaksanaan Program GenRe (Generasi Berencana) di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda". Dalam *eJournal Administrasi Negara Vol. 4 No. 4, Tahun 2016.* hal. 4738-4750.

"10 Negara dengan Jumlah Penduduk Terbanyak di Dunia", dalam situs http://ilmupengetahuanumum.com/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-populasi-terbanyak-di-dunia.